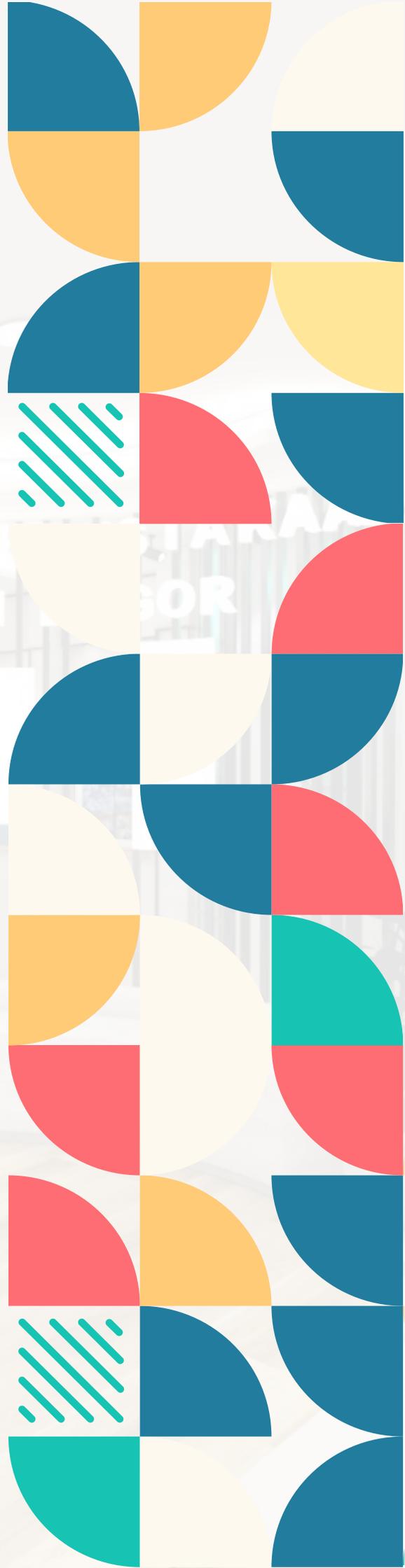




# Rencana Kerja

Dinas Arsip dan Perpustakaan

# 2025





BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara rencana Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025, Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor berkewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 23);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahunan.
12. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disingkat dengan RPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 3 (tiga) tahun, yang disusun secara teknokratik, sebelum terdapat kepala daerah definitif.
13. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat dengan RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut dengan RKPD Provinsi, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Kebijakan ...

20. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
24. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
26. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
27. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
28. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
29. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN MUATAN**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

**Pasal 2**

- (1) Renja PD Tahun 2025 merupakan pedoman rencana PD sesuai kewenangan bidang urusan.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025.
- (3) Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.
- (4) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025.
- (5) Renja PD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan PD.

**Bagian Kedua**

**Muatan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

**Pasal 3**

Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. tujuan dan sasaran PD;
- b. program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator dan target kinerja serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD; dan
- c. pendanaan dan sumber pendanaan.

**Pasal 4**

Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**

**SINKRONISASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025**

**Pasal 5**

- (1) Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 memedomani program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun 2025.
- (2) Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Renstra PD Tahun 2024-2026.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025 tidak sesuai dengan Renstra PD Tahun 2024-2026 yang diakibatkan oleh kebijakan nasional, maka dilaksanakan penyesuaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2025.

#### BAB IV

#### PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 6

- (1) Renja PD Tahun 2025 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan kebijakan nasional terkait kewenangan bidang urusan;
  - b. terjadi perubahan nomenklatur PD/kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja PD; dan
  - c. terjadi perubahan pada rincian belanja yang mendukung pencapaian target kinerja.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

##### Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2025 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2025;
- b. perumusan rancangan akhir Perubahan Renja PD Tahun 2025; dan
- c. penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025.

##### Pasal 8

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman PD dalam menyusun perubahan RKA SKPD;
- (3) Isi Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam SIPD.

#### BAB V

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 9

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan penyusunan Renja PD Tahun 2025.
- (4) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2025.
- (5) Kepala PD menyampaikan laporan triwulanan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.
- (7) Hasil evaluasi Renja PD Tahun 2025 menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. BUPATI BOGOR,



Diundangkan di Cibinong

pada tanggal 31 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



SURYANTO PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2024 NOMOR 17

## Kata Pengantar

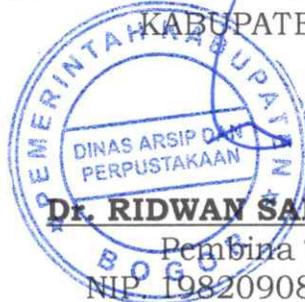
Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini merupakan tahapan siklus perencanaan pembangunan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Diharapkan bahwa Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini dapat menjadi acuan atau batu pijakan dalam penyusunan RKA/DPA Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya saran yang membangun (*constructive idea*) sangat kami perlukan bagi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.

Demikian Renja ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan selanjutnya.

Pt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BOGOR



**Dr. RIDWAN SAID, S.STP, M.Si**

Pembina Tk.I/IVb

NIP. 198209082001121001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum .....	4
1.3    Maksud dan Tujuan .....	9
1.4    Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>	
<b>TAHUN 2023</b> .....	<b>II-11</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan dan Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 .....	11
2.2    Analisis Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan.....	55
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan .....	59
2.4    Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	63
2.5    Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.....	79
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>III-80</b>
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	80
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan	89
3.3    Program dan Kegiatan .....	89
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN</b>	
<b>PERPUSTAKAAN</b> .....	<b>IV-103</b>
4.1    Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024-2026 .....	103
<b>BAB V     PENUTUP</b> .....	<b>V-123</b>



LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2024

TANGGAL : 31 JULI 2024

TENTANG : RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2025

**RENCANA KERJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025**

---

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025, yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Bogor. Selain merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2025, Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun kedua dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, ataupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024-2026.

Selain itu, Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahun pertama, baik dalam periode pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, maupun periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, yang penyusunannya dilakukan secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Proses sinkronisasi yang dilakukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, tidak hanya dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Bogor, tapi juga bersinergi dengan kebijakan pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rumusan arah kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi, target capaian kinerja serta sumber pendanaan, yang tertuang dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan ini, diharapkan telah bersinergi dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat Kabupaten



Bogor, maupun antar tingkatan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan amanat Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu rencana perangkat daerah adalah renja perangkat daerah. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 Nomor 30 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja perangkat daerah memuat evaluasi kinerja perangkat daerah tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L. Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah Pasal 1 ayat (21), Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Secara umum, mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 tidak mengalami perubahan, mengingat penyusunan Renja masih berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan
6. Penetapan Renja

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026, melalui program dan kegiatan yang tentunya selaras dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah yang dalam penyusunannya



memperhatikan pula kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah.

Secara umum, substansi Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan berisi prioritas program dan kegiatan yang merupakan hasil dari pendekatan perencanaan teknokratik, *bottom-up* dan *top-down* yang dihimpun secara partisipatif dan politis serta melalui proses sinkronisasi dalam Forum Perangkat Daerah. Dengan demikian, berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam tahapan penganggaran, hingga ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.

Tema Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah **“Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”**. Dan berpedoman pada Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2025, atas dasar hal tersebut Prioritas Pembangunan dan Fokus yang berkaitan dengan Tugas, Pokok Dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah:

- Urusan Kearsipan dan Perpustakaan mendukung Prioritas Pembangunan ke-2 (dua) yaitu Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik, Kinerja Aparatur, dan Penataan Administrasi.

Keselarasan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025, adalah :

- Urusan Kearsipan mendukung Prioritas Pembangunan ke-2 (dua) yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.
- Urusan Perpustakaan mendukung Prioritas Pembangunan ke-10 (sepuluh) yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja utama yang akan dicapai pada Tahun 2025 yang mengacu pada dokumen Renstra 2024-2026 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut:

1. Persentase perpustakaan yang mengelola perpustakaan berbasis TI.
2. Persentase unit kearsipan yang mengelola kearsipan berbasis teknologi informasi (TI)

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan salah satu tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Tuntutan publik dalam *good governance* dan *good corporate goverment* terhadap penyelenggaraan negara yang transparan, aspiratif dan akuntabel menuntut peningkatan



layanan kearsipan pada aparat maupun masyarakat.

Keberadaan Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan dan pembinaan kearsipan di Kabupaten Bogor menuntut kreatifitas dan kecerdasan lembaga dalam menciptakan tertib arsip dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Untuk mencapai maksud tersebut dibutuhkan dukungan serta peran dari berbagai pihak, baik dalam aspek anggaran maupun regulasi.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan kedepannya peran serta Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan kearsipan. Sedangkan penyelenggaraan perpustakaan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, menjadi payung hukum upaya-upaya pencerdasan masyarakat. Terlebih lagi dengan adanya program terencana Pemerintah Kabupaten Bogor dalam peningkatan IPM (*Indek Pembangunan Manusia*), maka peran perpustakaan menjadi *urgent* sebagai daya ungkit peningkatan capaian IPM dalam bidang pendidikan .

Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, arah dan kebijakan yang ditetapkan pada tahun 2025 dititikberatkan pada implementasi pelayanan prima di bidang kearsipan dan perpustakaan dengan didukung SDM yang memadai, sarana prasarana, dukungan anggaran, system/metode kerja dan peningkatan sistem informasi kearsipan dan perpustakaan yang lebih mutakhir dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan sebagai perangkat daerah dengan mempertimbangkan dari usulan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan usulan Pokir dan Boling serta pelaksanaan program dan kegiatan dari APBD Kabupaten Bogor.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah



- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  12. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  34. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
  35. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;



36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
39. Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
40. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
44. Peraturan Bupati Bogor Nomor 79 Tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran III atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor;



45. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Perpustakaan Daerah;
46. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya rancangan akhir Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai tahapan kelima dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2025.

Adapun tujuan disusunnya rancangan akhir Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah:

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2025.
2. Memberikan informasi public terkait rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUA-PPAS RKA dan RAPBD Tahun 2025.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2023**

- 2.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor



2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor

3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR**

**BAB V PENUTUP**

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor**

Pada tahun 2023 Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor melaksanakan 5 program, 17 kegiatan dan 64 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan;
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terdiri dari 1 (satu) kegiatan;
3. Program Pengelolaan Arsip, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan ;
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan;

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor kondisi Tahun Anggaran 2023 menghasilkan rata-rata capaian indikator output sebesar 118,90 % termasuk dalam predikat sangat tinggi, adapun Anggaran Belanja Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2023, untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama (IKU) sebesar Rp. 13.946.246.484,- terealisasi sebesar Rp. 12.695.083.218.,- atau 91,03%.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2023 yang mengacu pada laporan evaluasi kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2023, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut :

A. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

A.1. Secara keseluruhan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2023 telah memenuhi target sesuai dengan perencanaan, baik dalam penyerapan anggaran maupun pencapaian target outputnya.

Secara keseluruhan semua kegiatan outputnya terpenuhi 100%, walaupun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya tidak terserap 100% pada tahun 2023, dikarenakan adanya efisiensi anggaran dari belanja barang dan jasa dan perencanaan yang kurang matang.



- B. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang di rencanakan :
1. Program Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
    - 1.1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 905.008.627, - terealisasi sebesar Rp. 860.743.972,- atau 95,11%, dengan output dari jumlah Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk target 0.20% terealisasi 0.28%, Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat dari target 1,57% terealisasi 1,76%, Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk dari target 0,0004 terealisasi 0,0005, Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dari target 0.31 terealisasi 1,27%.
    - 1.2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 608.206.269,- terealisasi sebesar Rp. 599.755.725,00,- atau 98.61% dengan output dari Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat dari target 15 kegiatan terealisasi 15 kegiatan.
  2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, terdiri dari 1 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
    - 1.1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 25.000.087, - terealisasi sebesar Rp. 24.212.600,- atau 96.85%, dengan output dari umlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya dengan target 1 eksemplar terelisasi 1 eksemplar.
  3. Program Pengelolaan Arsip, terdiri dari 3 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
    - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 762.288.935,- terealisasi sebesar Rp. 731.206.609,- atau 95,92% dengan output dari Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan target 100% terealisasi 100%, dan persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dengan target 98% terealisasi 99,91%.
    - 2.2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 62.143.291,- terealisasi sebesar



- Rp. 60.785.885,- atau 97.82% dengan output dari Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dari target 95% terealisasi 95,07%;
- 2.3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 881.108.397,- terealisasi sebesar Rp. 852.933.345,- atau 96,80% dengan output Persentase jumlah arsip yang dimasukkan/entry dalam SIKN melalui JIKN dari target 60% terealisasi 82,30%;
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari 4 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 3.1 Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp. 30.665.855,- terealisasi sebesar Rp. 30.513.670,- atau 99,50% dengan output dari Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK dengan target 97.00 Point terealisasi 100 Point.
- 3.2 Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 33.223.725,- terealisasi sebesar Rp. 25.073.235,- atau 75,47% dengan output dari Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK dengan target 83.00 Point terealisasi sebesar 100 Point.
- 3.3 Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, dari rencana anggaran sebesar Rp. 235.726.471,- terealisasi sebesar Rp. 231.253.819,- atau 98.01% dengan output dari Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK dari target 80.00 Point terealisasi sebesar 82,30 Point.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
- 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 145.566.917,- terealisasi sebesar Rp. 142.974.616,- atau 98,22 % dengan output dari jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah 7 dokumen, terealisasi 100%.



- 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 7.615.723.258,- terealisasi sebesar Rp. 6.633.073.477,- atau 87,10 % dengan output dari jumlah dokumen laporan keuangan 18 dokumen, terealisasi 100%;
  - 4.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 29.365.435,- terealisasi sebesar Rp. 28.959.878,- atau 98,62% dengan output dari Jumlah layanan administrasi barang milik daerah 1 layanan, terealisasi 100%;
  - 4.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 55.310.131,- terealisasi sebesar Rp. 49.627.711,- atau 89,73% dengan output dari Jumlah layanan 2 layanan, terealisasi 100%;
  - 4.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 632.506.080,- terealisasi sebesar Rp. 591.293.063,- atau 93,48% dengan output dari jumlah layanan 6 layanan, terealisasi 100%;
  - 4.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 345.590.731,- terealisasi sebesar Rp. 341.000.000,- atau 98,67% dengan output dari jumlah layanan 3 layanan, terealisasi 100%;
  - 4.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 924.494.858,- terealisasi sebesar Rp. 861.728.885,- atau 93,21 % dengan output dari jumlah layanan 3 layanan, terealisasi 100%;
  - 4.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp. 654.317.417,- terealisasi sebesar Rp. 629.946.728,- atau 96,28% dengan output dari jumlah 5 layanan, terealisasi 100%;
- C. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja program/kegiatan.

Secara umum tingkat pencapaian 100%, adapun yang tidak mencapai target 100% lebih lengkapnya disajikan dalam table T.2.1 berikut ini :





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
12 17 12	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengelola Perpustakaan Umum/Khusus dan Sekolah</b>	<b>Jumlah Pengelola perpustakaan yang dibina</b>	<b>orang</b>	<b>150</b>						
	0001 Pembinaan,Supervisi,Monitoring dan Simulasi pada Perpustakaan Umum, Khusus dan Sekolah	Jumlah perpustakaan desa / sekolah yang mendapatkan supervisi dan pembinaan tentang perpustakaan pengelolaan perpustakaan	Perpustakaan Desa /Sekolah	80						
	0002 Bimtek pengelola perpustakaan	Jumlah peserta bimtek pengelola perpustakaan	orang	70						
12 17 13	<b>Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca Masyarakat</b>	<b>Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun</b>	<b>persen</b>	<b>1,3</b>						
	0001 Pelayanan Perpustakaan Keliling	Jumlah sekolah/desa yang mendapatkan layanan perpustakaan Keliling	Sekolah/	120						
	0002 Pengolahan dan Penataan dan Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka Perpustakaan	Jumlah koleksi bahan pustaka yang diolah dan ditata	Koleksi	3000						
	0003 Penyelenggaraan Lomba-lomba Perpustakaan	Jumlah siswa terbaik Lomba-lomba perpustakaan	peserta terbaik	9						
	0004 Penyelenggaraan Roadshow Perpustakaan Gerakan Kabupaten Gemar Membaca	Terwujudnya maysrakat gemar membaca	Lokasi	3						
	0005 Pelayanan Perpustakaan Hari Sabtu dan Minggu	Jumlah layanan perpustakaan yang dilaksanakan hari sabtu dan Minggu	kali	80						



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				0006	Pelayanan Perpustakaan Silang Layan	Jumlah perpustakaan yang mendapatkan pelayanan silang layan	Lokasi	10						
					<b>Kearsipan</b>									
	12	17	14		<b>Program Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku</b>	%	<b>100</b>						
				0001	Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah	Jumlah dokumen/arsip daerah yang terdata dan tertata	Boks	2000						
				0002	Penataan & Akuisisi Arsip Vital pada Perangkat Daerah/Kec	Jumlah akuisisi arsip Vital pada PD dan Kecamatan	kec/pd	10						
				0003	Penataan Arsip Statis & Vital	Jumlah arsip statis yang terkelola datanya	berkas	1200						
				0004	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	jenis	3						
				0005	Penelusuran Arsip Citra Daerah Kabupaten Bogor	Jumlah arsip citra daerah yang terdokumentasikan	dokumen	1						
				0006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan sarana dan Koleksi Arsip	Jumlah Sarana pengolahan dan Penyimpanan arsip yang terpelihara	boks	20000						



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0007	Penyediaan Jasa Fumigasi Arsip	Jumlah arsip daerah yang terpelihara	kali	2					
	12 17 15	<b>Program Penyelenggaraan Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Kearsipan Daerah</b>	<b>Jumlah alih media arsip konvensional menjadi arsip elektronik</b>	<b>Berkas</b>	<b>100000</b>					
	0001	Pengembangan & Pemeliharaan Sistem Informasi Kearsipan	Jumlah jaringan informasi kearsipan yang terpelihara	sistem	1					
	0002	Penyediaan layanan informasi Sadar Arsip	Terlaksananya kegiatan layanan informasi sadar arsip	lokasi	20					
	0003	Pengolahan Arsip Secara Elektronik dan sistem layanan jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	Jumlah arsip yang di entry kedalam Sistem SIKN dan JIKN	Berkas	100000					
	0004	Penyelenggaraan Pameran Kearsipan	Terlaksananya kegiatan Pameran Kearsipan	lokasi	2					
	0005	Preservasi Arsip Media Baru	Jumlah arsip media baru yang dipreservasi	kaset	25					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
12 17 16	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan SDM Pengelola Kearsipan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Keasipan</b>	<b>kegiatan</b>	<b>4</b>						
	0001 Pembinaan Kearsipan Pada Perangkat Daerah/Kecamatan dan Pemerintah Desa	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina tentang kearsipan	PD/Kec.	135						
	0002 Pembinaan Kearsipan pada Lembaga Pendidikan, BUMD dan Organisasi	Lembaga Pendidikan & BUMD	Lembaga	100						
	0003 Bimtek pengelola kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengelola kearsipan	Orang	100						
	0004 Sosialisasi Peraturan Kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi kearsipan	Orang	200						
	0005 Penyelenggaraan Lomba Seleksi Arsiparis/Pengelola Kearsipan Terbaik	Jumlah peserta terbaik kegiatan seleksi kearsipan tahun 2018	Orang	0						
12 17 17	<b>Program Penyelenggaraan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelola Kearsipan</b>	<b>Jumlah Unit Kearsipan yang termonitoring dan dievaluasi</b>	<b>unit kearsipan</b>	<b>280</b>						
	0001 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah/Kecamatan dan Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Daerah yg di Monev	PD/Kec.	130						
	0002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan pada Lembaga Pendidikan, BUMD dan Organisasi	Jumlah Perangkat Daerah yg di Monev	Lembaga Pendidikan/BUMD	100						



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
12	17	01								
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	<b>Keg</b>	<b>14</b>					
			Temuan materil							
		0001	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan sarana komunikasi,air dan lisitrik						
			- jaringan listrik	bulan	12					
			- jaringan air	bulan	12					
			- jaringan telepon	bulan	12					
			- line internet	bulan	12					
		0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional untuk kendaraan dinas						
			- Roda 4	Unit	13					
			- Roda 2	Unit	7					
		0003	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor							
			Jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor	Orang/bulan	12					
			Jumlah pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih	Jenis Alat Kebersihan & bahan Pembersih	13					
		0004	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya honor bulanan bagi pegawai kontrak dan agendaris						
			- Tenaga Kontrak/honoror	Orang	1					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
			bulan	12						
	0021	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kebutuhan ATK untuk pelaksanaan tupoksi	Paket	1					
			Jenis	20						
	0022	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan		1					
			Jenis	12						
	0023	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kebutuhan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor	Jenis	5					
	0024	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah kebutuhan surat kabar, peraturan perundang-undangan	jenis/bln						
			- surat kabar (Jenis)	Jenis	5					
			bulan	12						
			- majalah (Jenis)	Jenis	3					
			bulan	12						
	0025	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Tabung PMK dan gas							
			- tabung pemadam 1 kg	Unit	13					
			- Tabung Gas	Unit	2					
	0026	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan dan Minum							
			- rapat	Rapat	40					
			- tamu	Tamu	20					
			- pegawai	Pegawai	80					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0027	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan koordinasi luar daerah							
		- Rapat ke dalam	Kali	39						
		- Rapat Ke Luar	Kali	51						
	0042	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen	1					
				bulan	12					
	0043	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi barang	Dok	4					
	0044	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah piket keamanan kantor	Orang	13					
				bulan	12					
12	17	02	<b>Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>kgt</b>	<b>7</b>				
	0037	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang terehabilitasi	gedung	1					
	0045	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	10					
	0046	Pengadaan Peralatan kantor	Jumlah pengadaan peralatan Gedung kantor	Jenis	4					
	0102	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung	3					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0107	Pemeliharaan rutin/berkala area parkir kantor	Jumlah area parkir kantor yang terpelihara	Gedung	1					
	0110	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	unit						
		- kendaraan roda empat	Unit	13						
		- kendaraan roda dua	Unit	7						
	0112	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Jenis	3					
	0113	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi	Jumlah Instalansi jaringan listrik/dan komunikasi yang terpelihara	Jaringan listrik	4					
	12 17 01	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Terwujudnya disiplin aparatur</b>		<b>1</b>					
	0001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			45					
	12 17 04	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas</b>	<b>kgt</b>	<b>2</b>					
	0001	Pendidikan dan pelatihan aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek implementasi perundang-undangan							
		-Jumlah	Kali	3						
		- Peserta	Orang	3						
	0003	Pembinaan mental dan rohani bagi aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan rohani	kali	24					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	12 17 05	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan perangkat daerah</b>	<b>kgt</b>	<b>9</b>					
		0001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	3					
				bulan	12					
		0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Dok	2					
		0003 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dok	1					
		0004 Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah dokumen RKA/DPA DAPD serta dokumen RKA-P/DPA-P							
			- RKA/DPA DAPD 2019	Dok	2					
			- RKA/DPA PERUBAHAN 2018	Dok	2					
		0005 Penatausahaan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan DAPD	Dok	4					
		0006 Monitoring, evaluasi dan kinerja SKPD	Jumlah monitoring, evaluasi dan kinerja SKPD	bulan	12					
					1					
		0007 Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah publikasi kinerja SKPD		4					





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		12	18	22		<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan</b>		0,68					
						<b>Rasio Pengelola Perpustakaan</b>	<b>persen</b>		3,69					
						<b>Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat</b>	<b>persen</b>		1,00					
					0001	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah sekolah/desa yang mendapatkan layanan perpustakaan Keliling	Sekolah/		50				
						Jumlah perpustakaan yang mendapatkan pelayanan silang layan	Lokasi		<b>10</b>					
						Jumlah roadshow pusling	Lokasi		-					
						Jumlah layanan perpustakaan yang dilaksanakan hari sabtu dan Minggu	kali		<b>20</b>					
						Jumlah Lomba-lomba perpustakaan	kgt		<b>1</b>					
						Jumlah roadshow bunda literasi	Lokasi		-					
						Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis perpustakaan	kgt		-					
					0002	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Jumlah peserta bimtek pengelola perpustakaan	orang		0				
						Jumlah perpustakaan terbaik	perpust		0					



KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah peserta workshop perpustakaan	orang		0					
		Jumlah perpustakaan desa / sekolah yang mendapatkan supervisi dan pembinaan tentang perpustakaan pengelolaan perpustakaan	Perpustakaan Desa / Sekolah		30					
		<b>Kearsipan</b>								
	12 18 23	<b>Program Peningkatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah</b>								
		<b>Persentase arsip yang terkelola</b>	%		52,01					
		<b>Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku</b>	%		100					
		0001 <b>Pengelolaan Arsip Dinamis</b>								
		Jumlah PD dan Kecamatan yang terkelola arsipnya	kec/pd		5					
		Jumlah arsip daerah yang terpelihara/terfumigasi	kali		1					
		Jumlah upah jasa tenaga pengelola dan pemeliharaan arsip	bulan		12					
		Jumlah sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	jenis		2					
		0002 <b>Pengelolaan Arsip Statis</b>								
		Jumlah arsip statis yang terkelola datanya	berkas		500					
		Jumlah arsip statis yang terpelihara	berkas		500					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah arsip citra daerah yang terdokumentasikan	dokumen		0					
	0003	<b>Pengelolaan Otomasi Kearsipan</b>	Jumlah arsip konvensional yang di entry/updating kedalam Sistem	Berkas	97864					
		Jumlah lokasi kegiatan Pameran Kearsipan	lokasi		0					
		Jumlah jaringan informasi kearsipan yang terpelihara	sistem		0					
		Jumlah lokasi kegiatan layanan informasi sadar arsip	lokasi		5					
		Jumlah upah jasa tenaga entri dan layanan arsip	bulan		12					
	12	18	24	<b>Program Pembinaan Penyelenggaraan Kearsipan</b>	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	kegiatan		3		
					Persentase pengelolaan kearsipan yang berpredikat baik pada unit kearsipan			76,67		
		0001	<b>Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Supervisi kearsipan pada PD/Kecamatan dan Pemerintahan Desa</b>	Jumlah PD/Kec yang dibina tentang pengelolaan kearsipan	PD/Kec.		35			
				Jumlah PD/Kec yang termonev tentang pengelolaan kearsipan	PD/Kec.		80			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0002	<b>Pembinaan, Monotoring, Evaluasi dan Supervisi kearsipan pada lembaga pendidikan, BUMD dan organisasi</b>	Jumlah lembaga pendidikan yang dibina tentang pengelolaan kearsipan		0					
		Jumlah lembaga pendidikan yang termonev tentang pengelolaan kearsipan	lembaga pendidikan		50					
	0003	Bimbingan teknis pengelola kearsipan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek pengelola kearsipan							
12	18	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	point	65,55				
			Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai	persen	80					
			Persentase perencanaan sesuai target	persen	95					
			Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target	persen	95,25					
			Persentase pelayanan kepegawaian	persen	96					
	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah kebutuhan pembayaran rekening bulanan	<b>bulan, jenis</b>	12					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0002	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah kebutuhan surat khabar dan majalah		12					
	0003	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia		2					
	0004	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan dan		100					
	0050	Pengelolaan Aset Perangkat daerah	Jumlah dokumen pengelolaan aset		4					
	0052	Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah upah jasa piket keamanan kantor		12					
	0053	Pengelolaan Kebersihan Kantor	-Jumlah upah tenaga jasa pelayanan kebersihan kantor dan pengadaan alat kebersihan kantor		12					
	0054	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di bayarkan pajak tahunannya		20					
	0201	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia		0					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	0205	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		1					
	0206	Pengadaan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia		2					
	0352	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Penunjang Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara		3					
	0354	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		18					
	0355	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara		3					
	0357	Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi jaringan Listrik, komputer dan komunikasi	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik		2					
	0450	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi		75					
	1000	Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah upah bulanan tenaga honorer		12					
	1001	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah kegiatan Pembinaan mental dan rohani		3					



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	1003	Penyediaan Pelayanan Administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian	Tahun/bulan		12					
	1004	Pengembangan kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti Diklat								
	2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Dokumen		2					
	2002	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan jkeuangan	Dokumen, bulan		12					
	2003	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja	Dokumen, bulan		12					
	2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen RKA/DPA DAPDTh 2021 serta Dok RKA-P/DPA-P 2020	Dokumen		2					
	2005	Penyusunan Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan renja DAP Tahun 2021 dan 2020P	Dokumen		0					
	2007	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen monev kegiatan	Dokumen		4					
	2008	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang terpublikasi	kali		4					





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lokasi			0	3			
		Jumlah perpustakaan yang terfasilitasi sarananya	perpustakaan					8	8	100%
	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	lokasi			30	100			
		Jumlah Perpustakaan Terbaik	perpustakaan				3	3	3	100%
		Jumlah upah tenaga bantu pembinaan perpustakaan	bulan				12			
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	perpustakaan				80	60	92	153%
	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	kegiatan			2	5	8	8	100%
		Jumlah Peserta Bimtek pengelola Perpustakaan	peserta			-	60	60	70	117%
		Jumlah Peserta FGD	peserta			-	60			
		Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	peserta			-	60	60	70	117%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	8 Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yang tersedia	eksemplar			1.200,00	650			
		Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	eksemplar				1.080,00	1200	1200	100%
	9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah koleksi bahan pustaka perpustakaan yang tersedia	eksemplar			1.200	1.090,00			
		Jumlah upah jasa tenaga arsip dan perpustakaan yang dibayarkan	bulan			12	12			
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	eksemplar				1.090	1200	1200	100%
	10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan sistem informasi database data info perpustakaan yang tersedia	dok			-	1			
		Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dok				1	1	1	100%
2	23	2	02.02							
		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat</b>	<b>kgt</b>		4	<b>12</b>	15	15	100%
	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah layanan perpustakaan keliling	lokasi		4	120			
		Jumlah kegiatan rakor dengan Sekolah/TBM/SKPD					4			
		Jumlah kegiatan gerakan pustaka ceria					8			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah upah jasa layanan perpust	bulan			12	12			
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus				120	120	125	104%
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	lokasi			1	1	1	1	100%
		Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	perpustakaan				1	1	1	100%
	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	kgt			1	3	3	3	100%
		Jumlah lomba-lomba perpustakaan					1			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	orang				3	12	14	117%
	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	kgt			-	4			
		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	perpustakaan					3	3	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan duta baca kab.bogor	peserta			2	30	30	30	100%
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	orang					2	2	100%
		<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	<b>Persentase naskah kuno dan koleksi budaya nusantara yang dikelola dan dilestarikan</b>	<b>persentase</b>			-	<b>100</b>	100	100	100%
		<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialihmedia (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</b>	<b>eksemplar</b>			-	-	1	1	100%
			<b>Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa</b>	<b>eksemplar</b>			-	-	1		0%
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah peserta sosialisasi dan inventarisasi keberadaan naskah kuno milik daerah	peserta				30	50	50	100%
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	orang					50	50	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023					
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%			
	<b>Kearsipan</b>												
2	24	2				<b>85,44</b>	<b>88,14</b>	90	94,32	105%			
<b>2</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>02.01</b>			<b>97</b>	<b>100</b>	100	100	100%			
						<b>95</b>	<b>96,5</b>	98	99,91	102%			
			1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Dinamis yang terdata dan tertata	Box			2.210,00	2.550,00			
					Jumlah Pd/Kec Yang terkelola	PD/Kec			5	10	10	15	150%
					Jumlah Upah Tenaga Bantu Pencatatan Arsip	Bulan			12	12	12	12	100%
					Jumlah arsip dinamis yang terdata dan tertata pada PD/Kec	Box			2.210,00	15			
					Jumlah Naskah Dinas yang di ciptakan	PD/Kec			5	2.099,00	1500	2772	185%
					Pemutahiran Data					2.050,00			
			2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah kegiatan fumigasi arsip	kl			1	2	2	2	100%



KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
						Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	bokx					1000	1040	104%
				3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/kecamatan yang termonitoring pengelolaan kearsipannya	PD, Kec, Desa			63	40	200	154	77%
						Jumlah lembaga pendidikan yang termonitoring pengelolaan kearsipannya	lembaga pendidikan			65	80			
						Jumlah peserta desk pengawasan/audit kearsipan	orang				200			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota					1	1	1	100%
2	24	2	02.02		<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</b>	<b>persen</b>			<b>73,3</b>	<b>78,04</b>	95	95,07	100%
				2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang terdata, terkelola dan terpelihara	berkas			500	1.000,00			
						Jumlah arsip Statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis					1.000,00	500	875	175%
						Jumlah Buku Sejarah yang tercetak					100			
2	24	2	02.03		<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase jumlah arsip yang dimasukkan/entry dalam SIKN melalui JIKN</b>				<b>73,3</b>	<b>73,12</b>	60	82,3	137%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023			
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%	
	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan Sadar Arsip	lokasi			-	-			
			Jumlah sistem aplikasi yang terpelihara	titik			28	2			
			Jumlah Upah Tenaga Bantu entry data	Bulan			12	12	12	12	100%
			Jumlah Arsip yang dientry dalamSKD/SKIN Melalui JIKN	Berkas			98.250,00	72.008,00	40000	43702	109%
			Jumlah alih media arsip melalui sistem SIKD dan SIKN/JIKN	Berkas			98.250,00	72.008,00			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN					100	100	275	275%
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan pada PD/KEC dan Pemerintahan Desa	kgt			-	3			
			Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelolaan kearsipan pada PD/KEC dan Pemerintahan Desa					2	3	4	133%
			Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan					4			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota					1	3	4	133%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
2 24 3	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	persen			86,11	86,11	83	97,05	117%
2 24 3	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	point				100	97	100	103%
2 24 3	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah arsip yang dinilai sesuai jadwal retensi arsipnya	berkas				1.050,00	1000	1000	100%
		Jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun					1.050,00	1000	1000	100%
2 24 3	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah arsip yang dimusnahkan	berkas				1.050,00			
		Jumlah arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan					1.050,00			
2 24 3	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	point				75	83	100	120%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah arsip yang terevakuasi dan teridentifikasi akibat bencana	berkas				500	500	0	0%
		Jumlah Lokasi yang teridentifikasi arsip akibat bencana					2	0	0	0%
2	24	3	02.03				83,33			
		<b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan</b>	<b>Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang di gabung dan/atau di bubarkan</b>							
	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang terakuisisi dan terdata pada Perangkat Daerah Yang dibubarkan	Instansi		1	1			
			Jumlah arsip yang digabungkan yang dikelola	Instansi		1	1			
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan, dan penilaian serta penyerah/pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kab/kota				1.000,00			
2	24	3	02.04			91,67	91,67	80	82,3	103%
			<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>	<b>Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK</b>	point					
	1	Penilaian dan Penetapan autentitas arsip statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Arsip statis yang di autentikasi sesuaipersyaratan penjaminan keabsahan arsip	berkas		-	1.000,00			



KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah daftar autentifikasi sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang dinilai dan ditetapkan					150	1000	1004	100%
	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	berkas			6.000,00	16.000,00			
		Jumlah Layanan Sadar Arsip Pd/Desa/Kel/Sekolah	lokasi			58	102			
		Jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip					100	9000	9150	102%
		Jumlah layanan alih media arsip vital desa	lokasi			58	107			
		<b>PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP</b>	<b>Cakupan layanan arsip bersifat tertutup</b>				<b>100</b>			
		<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK</b>							
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP yang tersusun				1			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar dan Penetapan ijin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup	dok				1			
	<b>Penunjang</b>									
2	24	1					<b>100</b>	100	100	100%
2	24	1	02.01							
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>persen</b>							
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD</b>	<b>dok</b>			<b>6</b>	<b>7</b>	7	7	100%
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra/renja, renja 2021P dan renja 2022 dinas	dok			2	2		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3	8	8	100%
			Jumlah peseta forum PD				150			
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA tahun 2022 yang tersusun	dok			1	1		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1	1	1	100%
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA 2022 yang tersusun	dok			1	1		



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1	1	1	100%
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	dok			1	1			
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1	1	1	100%
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dok			1	1			
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1	1	1	100%
		Penyusunan DPAP 2023	dok					1	1	100%
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bulan/dok			12	12			
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1	1	1	100%
		Jumlah upah tenaga honor pemda yang dibayarkan					12	12	12	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja triwulanan dinas	dok			4	4			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4	4	4	100%
						Jumlah publikasi kinerja PD					1			
2	24	1	02.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>dok</b>			<b>6</b>	<b>6</b>	18	18	100%
				1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan			12	9			
						Jumlah Pegawai ASN yang terpenuhi gaji dan tunjangannya					12	12	12	100%
				3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi data penatausahaan keuangan	bulan			12	12			
						Jumlah upah/jasa pengelola administrasi					12			
						Jumlah dokumen SPJ dinas					4	4	4	100%
				4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dinas	bulan			12	12			
						Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan					3	3	3	100%
						jasa upah tenaga bantu penatausahaan keuangan					12			
				5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan akhir tahun	dok			1	1			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun					1			
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok					1	1	100%
	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok			12	12			
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan					12			
		Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran					12			
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	dok					12	12	100%
	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dok			1	1			
2	24	1	02.03							
		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi barang milik daerah yang terkelola</b>	<b>layanan</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>
	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah yang tersusun	dok				4	4	
		Jumlah Jasa tenaga upah administrasi yang dibayar					12	12	12	100%



## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023				
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%		
		Jumlah Belanja Modal per Semester					2					
		Jumlah data Stock Opname per Semester					2					
		Jumlah KIB tahunan					1					
		Jumlah Penyusunan LBPS					2					
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan					5	5	100%		
2	24	1	02.05									
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi barang milik daerah yang terkelola</b>	<b>layanan</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang terkelola data kepegawainnya	orang				39	41			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok					3	3	100%	
			Jumlah upah jasa tenaga administrasi yang dibayar	orang					12	12	100%	
		9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	orang				2	2		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						3	5	2	40%
2	24	1	02.06									
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi umum PD yang terfasilitasi</b>	<b>layanan</b>				<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	jenis				15	15		
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia						42			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	jenis					6	6	100%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	jenis					21	27	129%
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jenis			2	2			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	jenis					3	3	100%
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis			9	4			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan					4	4	4	100%
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bulan			9	12			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	12	12	100%
	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	org/boks			200	540			
		Terjamunya tamu kantor dan peserta rapat dengan baik	org/boks				150			
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan					10	10	100%
		Penyediaan mamim jamuan tamu dan rapat	org/boks					230	231	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE					PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
								REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
				9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam dan luar daerah	kali/lokasi			10	48	55	64	116%
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2	25	25	100%
2	24	1	02.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>layanan</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	3	3	100%
				2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang tersedia	unit			2	-			
				5	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeler yang tersedia	jenis			2	1			
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					1	3	3	100%
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	jenis			3	-			
2	24	1	02.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan PD</b>	<b>layanan</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	3	3	100%
				1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah arsip dinamis aktif yang dikelola	bulan			12	12			
						jumlah jasa upah tenaga administrasi yang dibayarkan	bulan			12	12	12	12	100%



KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		jumlah arsip aktif yang terkelola					1			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan					12	12	100%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan			12	12			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					4	12	12	100%
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jenis			5	3			
		Jumlah upah tenaga keamanan dan kebersihan yang dibayarkan	bulan			12	12	12	12	100%
		Jumlah pencegahan covid-19 yang tersedia					1			
		Jumlah upah jasa petugas keamanan yang dibayar	bulan			12	12			
		Jumlah upah jasa petugas kebersihan yang dibayar					12			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka	laporan					12	12	100%
2	24	1	02.09							
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Pelayanan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>6</b>	<b>3</b>	5	5	100%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan yang terpelihara			6	12			



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					12	6	6	100%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit			4	9			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					11	6	6	100%
	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jenis			1	12			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (lift barang)					12			
		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	jenis					1	1	100%
	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	gedung			2	4			
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					7	2	2	100%



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (GRAND OUTPUT)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023		
				REALISASI				TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (10/9) x 100%
	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara			2	4			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4	9	3	3	100%
			terpeliharanya umur peralatan gedung kantor				11			
	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jaringan listrik yang terpelihara			1	12			



**Tabel 2.2**  
**Hasil Pencapaian Dukungan terhadap Pancakarsa Tahun 2023**

PANCAKARSA	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	VOLUME (TAHUN 2019)			VOLUME (TAHUN 2020)		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	$7 = \frac{(6/5)}{X100\%}$	8	9	$10 = \frac{(9/8)}{X100\%}$
		tidak ada							

## 2.2. Analisis Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan

Hasil pengukuran dan evaluasi kinerja baik kegiatan maupun sasaran menunjukkan nilai capaian yang baik. Apabila melihat hasil pengukuran dan evaluasi secara umum pencapaian indikator kinerja kunci menunjukkan capaian rata-rata 110,66% dalam upaya pencapaian sasaran strategis. Sedangkan pencapaian kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja rata-rata 118,90 %.

Adapun hambatan dan permasalahan yang harus ditindaklanjuti dalam upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga fungsional dan pengelola kearsipan maupun tenaga fungsional pustakawan dan pengelola perpustakaan dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan;
2. Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan;
3. Kurangnya kesadaran dari aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya arsip yang memiliki nilai guna tinggi.

Meskipun ada hambatan yang dihadapi akan tetapi kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada sasaran strategis Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, telah berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kedepannya untuk meraih kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan sasarnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan pada BKPSDM untuk menerima pegawai yang berlatarbelakang kearsipan dan pustakawan pada penerimaan CPNS atau PPPK tahun berikutnya;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dengan selalu melakukan terobosan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang kinerja yang efektif dan efisien.
3. Pengembangan sistem informasi kearsipan dan perpustakaan yang mudah diterapkan (friendly use);
4. Mengoptimalkan sosialisasi dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penyelamatan arsip yang mempunyai nilai guna sebagai alat bukti yang sah kepada Institusi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor maupun masyarakat secara umum.



5. Menjalin kerjasama lebih intens dengan stakeholder terkait dalam hal pemanfaatan layanan perpustakaan digital (i-bogorkab) maupun kearsipan digital.

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimum (SPM)/Standar Nasional untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar, Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta Indikator Kinerja Utama (IKU)/Muatan Lokal, sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Wajib Non Pelayanan Dasar dengan bidang urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan yang dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, meliputi aspek penilaian pada tataran pengambilan kebijakan, pelaksana kebijakan dan tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan Analisis Kebutuhan Pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang melekat didalamnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini.



**TABEL 2.3. a**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA Tahun 2019 s/d TAHUN 2021**

**URUSAN** : Wajib Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN** : Perpustakaan dan Kearsipan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2019	2020		2021			
			REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100%	8	9	10 = (9/8)x100%
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	1.31	1.84	0.68	37.05	1.86	0.74	39.78
2	Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang mengelola arsip berbasis teknologi	Persen	15.63	31.25	18.75	60.00			



**TABEL 2.3. b**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH HINGGA Tahun 2021 s/d TAHUN 2023**

**URUSAN** : Wajib Non Pelayanan Dasar  
**BIDANG URUSAN** : Perpustakaan dan Kearsipan  
**PERANGKAT DAERAH** : Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2021	2022		2023			
			REALISASI	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)x100%	8	9	10 = (9/8)x100 %
1	Persentase Pengunjung Perpustakaan	Persen	0.74	1.89	2.51	132.85	1.93	2.46	127.82
2	Persentase arsip vital yang dialih mediakan	Persen	35.58	65.14	58.41	89.67	100.00	93.51	93.51

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2.3 tampak bahwa tidak seluruh target tercapai :

1. Persentase pengunjung perpustakaan adalah angka yang menunjukkan jumlah pengunjung perpustakaan atau pemustaka yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi jumlah populasi yang harus dilayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2023 persentase pengunjung perpustakaan terealisasi sebesar 2.46% dari target sebesar 1.93% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 127.82% yang artinya target kinerja persentase pengunjung perpustakaan tercapai.
2. Persentase arsip vital yang dialihmediakan pada tahun 2023 ditargetkan 100,00% terealisasi 93,51% atau 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) Desa yang arsip vitalnya dialihmediakan dari 416 (empat ratus enam belas) Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sehingga tingkat capaian kinerjanya 93,51%.

Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja sasaran tersebut adalah belum terbangunnya kesadaran akan pentingnya melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip khususnya “Arsip Vital” (arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang) yang dimiliki Pemerintahan Desa yang mempunyai nilai guna salah satunya dengan metode “Digitalisasi/Alih Media Arsip”. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diantaranya adalah ada beberapa Pemerintahan Desa yang arsip vitalnya hilang/rusak, tidak hadir dalam pelaksanaan kegiatan alih media arsip yang kita selenggarakan dan yang tidak bersedia arsip vitalnya untuk dialihmediakan.

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Arsip dan Perpustakaan**

Kemudian hal selanjutnya yang menjadi Isu Penting yang dapat mempengaruhi kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

#### **I. Bidang Perpustakaan**

Analisis smart untuk peningkatan layanan perpustakaan melibatkan penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam analisis smart untuk peningkatan



layanan perpustakaan antara lain:

1. Digitalisasi koleksi perpustakaan: Perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengubah koleksi mereka menjadi format digital. Ini akan memudahkan akses dan penggunaan koleksi, serta membantu menjaga keamanan dan konservasi bahan-bahan penting.
2. Implementasi sistem manajemen perpustakaan cerdas: Perpustakaan dapat menggunakan sistem manajemen perpustakaan yang cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Sistem ini memudahkan pencarian dan peminjaman buku, serta memungkinkan staf untuk mengatur koleksi secara efisien.
3. Pelayanan online dan mobile: Perpustakaan dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan online kepada pengguna, seperti pendaftaran anggota, peminjaman ebook, dan jasa referensi online. Selain itu, aplikasi mobile juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang koleksi perpustakaan dan jadwal acara.
4. Analisis data pengguna: Perpustakaan dapat menganalisis penggunaan koleksi dan layanan mereka untuk memahami kebutuhan dan preferensi pengguna mereka. Hal ini dapat membantu perpustakaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi mereka serta memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna.
5. Internet of Things (IoT): Teknologi IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol kondisi lingkungan dalam perpustakaan, seperti suhu dan kelembaban. Hal ini membantu mencegah kerusakan pada koleksi dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna.
6. Pelatihan staf: Staf perpustakaan harus diberikan pelatihan reguler tentang teknologi baru dan cara menggunakan teknologi tersebut untuk meningkatkan layanan mereka.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, analisis smart dapat membantu mengidentifikasi teknologi cerdas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna.

## II. Bidang Kearsipan

Analisis smart untuk peningkatan layanan kearsipan melibatkan penggunaan teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsip. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam analisis smart untuk peningkatan layanan kearsipan antara lain:

1. Implementasi sistem manajemen arsip cerdas: Penggunaan sistem manajemen arsip yang cerdas dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsip, termasuk pencarian dan pemrosesan dokumen arsip. Sistem ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dokumen arsip.
2. Digitalisasi arsip: Digitalisasi dokumen arsip dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempermudah pencarian dokumen arsip. Selain itu, dokumen digital juga lebih mudah untuk disimpan dan dipindahkan daripada dokumen fisik.
3. Analisis data arsip: Analisis data dapat membantu mengidentifikasi dokumen arsip yang paling penting dan memberikan pandangan tentang bagaimana dokumen tersebut digunakan dalam operasi bisnis. Analisis ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan dokumen arsip dan memperbaiki efisiensi operasional.
4. Keamanan dokumen arsip: Teknologi keamanan seperti enkripsi data dan autentikasi pengguna dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dokumen arsip dan melindungi informasi penting dari akses yang tidak sah.
5. Internet of Things (IoT): Teknologi IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan di mana dokumen arsip disimpan, seperti suhu dan kelembaban, sehingga dapat mencegah kerusakan pada dokumen.
6. Pelatihan staf: Pelatihan reguler tentang teknologi baru dan cara penggunaannya dapat membantu staf dalam mengelola dokumen arsip dengan lebih efektif.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kearsipan, analisis smart dapat membantu mengidentifikasi teknologi cerdas yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsip. Dengan penggunaan teknologi cerdas,



layanan kearsipan dapat menjadi lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Berdasarkan hasil analisis SMART di atas maka dapat disimpulkan yang menjadi Isu Penting yang bisa memberikan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan yang efektif dan efisien serta pencitraan baik terhadap kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, sebagai berikut :

### **I. Bidang Perpustakaan**

1. Dalam upaya peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan peningkatan minat budaya baca masyarakat Bidang Pengelolaan Perpustakaan akan lebih mengoptimalkan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka efisiensi operasional dan pengembangan sarana, prasarana serta SDM pengelola perpustakaan baik itu yang ada di Perpustakaan umum Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor maupun perpustakaan yang berada di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, Sekolah di Kabupaten Bogor, bahkan kedepannya di setiap areapelayanan publik minimal ada pojok baca, hal ini dapat terwujud dengan adanya kepedulian dari Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait secara konsisten ikut berpartisipasi dalam pengembangan perpustakaan dalam rangka mewujudkan minat budaya baca masyarakat untuk menjadikan masyarakat pembelajar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

### **II. Bidang Kearsipan**

Penjelasan arsip menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan:

Pasal 1 :

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian peran kearsipan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sangatlah penting dalam upaya menyelamatkan

naskah, buku, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, aslinya atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan, sebagai bukti atas tujuan, organisasi, fungsi-fungsi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, keputusan-keputusan, prosedur-prosedur, pekerjaan-pekerjaan, atau kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, atau karena pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya, atas dasar hal tersebut bidang urusan kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor sangat perlu adanya peningkatan kuantitas maupun kualitas dari segi Sumber Daya Manusia, sarana maupun prasarana maupun pemeliharaan sarana dan koleksi arsipnya. Guna mendukung peningkatan pengelolaan arsip yang optimal sesuai dengan norma standar baku kearsipan dan bisa menjadi sumber informasi yang aktual dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen arsip dalam rangka mewujudkan SPBE dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Proses membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja dan Anggaran (RKPD) dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor merupakan bagian dari tahapan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang akan disusun dalam RKPD dapat memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.

Berikut adalah langkah-langkah umum yang mungkin dilakukan dalam proses ini:

1. Pengumpulan Data: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor akan mengumpulkan data dan informasi terkait kebutuhan mereka. Ini bisa melibatkan analisis terhadap kondisi perpustakaan dan arsip saat ini, tren peminjaman, penggunaan fasilitas, kebutuhan sumber daya manusia, dan lain sebagainya.
2. Identifikasi Kebutuhan: Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor akan mengidentifikasi kebutuhan mereka. Ini mungkin termasuk perluasan fasilitas perpustakaan, pengadaan koleksi baru,

pengembangan program-program edukasi, peningkatan layanan arsip, dan sebagainya.

3. Penyusunan Rancangan Awal RKPD: Pemerintah daerah akan menyusun Rancangan Awal RKPD, yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Rancangan ini akan mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Bagian yang relevan dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor akan mencerminkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.
4. Perbandingan dan Penyesuaian: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor akan membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan mereka. Mereka akan memastikan bahwa rencana yang diusulkan dalam RKPD sejalan dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi. Jika ada ketidaksesuaian atau kurangnya alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan dapat mengajukan perubahan atau penyesuaian.
5. Konsultasi dan Koordinasi: Proses ini mungkin melibatkan konsultasi dan koordinasi antara berbagai unit pemerintah daerah, termasuk Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unit-unit terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas penganggaran dan pelaksanaan rencana.
6. Finalisasi RKPD: Setelah konsultasi dan penyesuaian dilakukan, RKPD akan di-finalisasi. Dokumen ini akan mencakup rencana kerja dan alokasi anggaran untuk berbagai sektor, termasuk Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor.
7. Implementasi: Setelah RKPD disetujui, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor dapat melaksanakan rencana kerja sesuai dengan alokasi anggaran yang telah dialokasikan. Mereka akan menjalankan program-program, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Proses ini merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan daerah dalam upaya untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dan rencana kerja secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sektor, termasuk perpustakaan dan arsip. Setelah proses

membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, berbagai temuan mungkin dapat diidentifikasi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang temuan-temuan tersebut, serta catatan penting yang berkaitan dengan perbedaan antara rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan:

a. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Baru:

Temuan ini mungkin mengindikasikan bahwa dalam hasil analisis kebutuhan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor telah mengidentifikasi program, kegiatan, atau sub kegiatan baru yang belum tercakup dalam rancangan awal RKPD. Catatan pentingnya adalah untuk mengevaluasi urgensi dan relevansi dari rumusan ini, serta apakah penambahan ini dapat mendukung pencapaian tujuan strategis dan prioritas pemerintah daerah.

b. Perbedaan Besaran Anggaran:

Jika program/kegiatan/sub kegiatan yang terdapat dalam rancangan awal RKPD cocok dengan yang diidentifikasi dalam analisis kebutuhan, tetapi terdapat perbedaan besar dalam alokasi anggarannya, ini bisa menjadi temuan yang signifikan. Penting untuk mengkaji mengapa terdapat perbedaan besar dan apakah besaran anggaran yang ditetapkan dalam rancangan awal RKPD cukup untuk mencapai hasil yang diharapkan.

c. Prioritas yang Berbeda:

Jika terdapat perbedaan dalam prioritas program/kegiatan/sub kegiatan antara hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD, catatan pentingnya adalah untuk mengidentifikasi alasan di balik perbedaan ini. Apakah ada perubahan dalam visi atau arah kebijakan pemerintah daerah yang mempengaruhi prioritas ini.

d. Kekurangan Anggaran untuk Kebutuhan Tertentu:

Jika hasil analisis kebutuhan menunjukkan kebutuhan yang mendesak tetapi alokasi anggaran yang diusulkan dalam rancangan awal RKPD tidak mencukupi, ini adalah temuan yang perlu diberi perhatian. Catatan pentingnya adalah untuk menyusun argumen yang kuat untuk mendukung peningkatan alokasi anggaran, terutama jika kebutuhan ini dianggap esensial.

e. Keterbatasan Rincian atau Fokus:



Jika program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan dalam rancangan awal RKPD tidak memberikan cukup rincian atau fokus terhadap kebutuhan yang diidentifikasi dalam analisis, temuan ini menunjukkan perlunya penyempurnaan dalam merancang rencana kerja yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks.

Catatan penting dalam menangani perbedaan antara hasil analisis kebutuhan dan rancangan awal RKPD adalah menjaga dialog terbuka dan kolaboratif antara semua pihak yang terlibat. Ini akan membantu mengidentifikasi solusi yang tepat, menyesuaikan prioritas, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak terkait. Selain itu, fleksibilitas dalam merancang dan merevisi RKPD sesuai kebutuhan aktual juga sangat penting.

Review rancangan awal rencana kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rencana kerja tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025. Untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan dalam penganggaran tahun 2025, yang berakibat terdapat beberapa perubahan indikator, target capaian serta pagu indikatif sebagaimana hasil review yang disajikan dalam tabel berikut :



TABEL 2.4  
 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025  
 KABUPATEN BOGOR

URUSAN /UNSUR : Wajib Non Pelayanan Dasar  
 BIDANG URUSAN : Perpustakaan dan Kearsipan  
 PERANGKAT DAERAH : Dinas Arsip dan Perpustakaan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Bogor	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	64,823	1.757.086.025	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kab. Bogor	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	64,823	1.836.918.934	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0,242	1.073.959.839	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0,242	963.918.934	
		Kab. Bogor	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	1,8997			Kab. Bogor	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	1,8997		
		Kab. Bogor	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0,000484			Kab. Bogor	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persentase	0,000484		
		Kab. Bogor	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	0,3751			Kab. Bogor	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase	0,3751		
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bogor	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	85	248.632.982	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Kab. Bogor	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	85 Perpustakaan	178.750.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	12	176.717.001	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	12 Perpustakaan	137.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	65	211.424.193	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	65 Orang	218.000.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1	45.740.625	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500	334809582	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500 Eksemplar	320.000.000	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1	56.635.456	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1 Perpustakaan	60.168.934	
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat</b>	<b>Kegiatan</b>	10	683126186	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah masyarakat gemar membaca di masyarakat</b>	<b>Kegiatan</b>	10	<b>873.000.000</b>	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	3	31.889.339	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	3 Orang	110.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bogor	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	4	183.841.860	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bogor	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	4 Perpustakaan	215.000.000	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	34.298.744	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1 Perpustakaan	41.000.000	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	3	159.135.980	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	12 Orang	190.000.000	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Bogor	Jumlah Lokus PembudayaanKegemaran Membaca danLiterasi pada SatuanPendidikan Dasar danMasyarakat	Lokus	170	273.960.263	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Kab. Bogor	Jumlah Lokus PembudayaanKegemaran Membaca danLiterasi pada SatuanPendidikan Dasar danMasyarakat	Lokus	170 Lokus	317.000.000	
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Kab. Bogor	<b>Persentase naskah kuno dan koleksi budaya nusantara yang di kelola dan di liestarikan'</b>	Persentase	<b>100</b>	<b>25.690.751</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	Kab. Bogor	<b>Persentase naskah kuno dan koleksi budaya nusantara yang di kelola dan di liestarikan'</b>	Persentase	<b>100</b>	<b>20.000.000</b>	
	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya</b>	Eksemplar	1	25.690.751	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>	Kab. Bogor				<b>20.000.000</b>	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Bogor	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Eksemplar	1	25.690.751	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kab. Bogor	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Eksemplar	60 Orang	20.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>10.134.973.390</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>14.998.858.470</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>7</b>	<b>144.089.940</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>8</b>	<b>259.826.487</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	37.867.124	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8 Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	16.826.487	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	16.826.487	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	11.121.293	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	13.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	7.202.403	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	7.541.503	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	46.112.876	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	25.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	17.418.254	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	-	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18</b>	<b>6.721.758.365</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Dokumen</b>	<b>18</b>	<b>8.950.370.233</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	12	6.598.063.748	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	40 Orang/bulan	8.772.370.233	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	77.587.414	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	105.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	15.978.943	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3 Dokumen	20.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.714.937	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	18.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	1	19.413.323	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		1 Laporan	35.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi barang milik daerah yang terkelola</b>	Layanan	1	<b>25.427.105</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi barang milik daerah yang terkelola</b>	Layanan	1	<b>35.000.000</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	25.427.105	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bogor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	35.000.000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terfasilitasi</b>	Layanan	2	<b>102.962.672</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang terfasilitasi</b>	Layanan	2	<b>205.000.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Stel	40	20.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bogor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		40 Paket	20.000.000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3	34.962.672	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bogor	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	48.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bogor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17 Orang	85.000.000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi umum PD yang terfasilitasi</b>	Layanan	6	<b>555.249.776</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Bogor	<b>Jumlah layanan administrasi umum PD yang terfasilitasi</b>	Layanan	6	<b>1.853.965.250</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	20.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bogor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	80.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	228.588.791	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19 Paket	990.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	31.254.721	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	40.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	173.965.250	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	173.965.250	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	Laporan	10	26.674.695	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	70.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30	74.766.319	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	500.000.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Layanan</b>	2	763382611	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan pengadaan barang milik daerah</b>	<b>Layanan</b>	2	<b>1.050.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	725.315.625	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	11 Unit	800.000.000	
	Pengadaan Mebel	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3	38.066.986	Pengadaan Mebel	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	135 Unit	250.000.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan PD</b>	<b>Layanan</b>	3	<b>732.446.215</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan jasa penunjang urusan PD</b>	<b>Layanan</b>	3	<b>965.000.000</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	30.388.058	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	216.984.116	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	300.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	485.074.041	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	600.000.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Layanan</b>	<b>7</b>	<b>1089656706</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>Layanan</b>	<b>7</b>	<b>1.679.696.500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6	100.368.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6 Unit	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8	275.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	270.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1	120.094.744	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1 Unit	140.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	13.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3 Unit	13.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	444.497.462	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	1.000.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	36.328.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	36.328.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	100.368.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	100.368.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	91	1.700.516.195	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase	91	3.720.000.000	
	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	100	877.325.036	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	100	1.000.000.000	
		<b>Kab. Bogor</b>	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	98,75			<b>Kab. Bogor</b>	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	98,75		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	2200	598.625.170	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	2200 Berkas	600.000.000	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	1100	160.373.601	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	1100 Berkas	200.000.000	
	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan HasilPengawasan Arsip DinamisKewenanganKabupaten/Kota	Laporan	1	118.326.265	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan HasilPengawasan Arsip DinamisKewenanganKabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	200.000.000	
	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</b>	Persentase	77	227984379	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>				<b>270.000.000</b>	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1100	227.984.379	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1100 Arsip	270.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</b>	<b>Persentase</b>	<b>77</b>	<b>595.206.780</b>	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>				<b>2.450.000.000</b>	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	700	117.630.795	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	700 Pengguna	450.000.000	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	477.575.985	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	14 Laporan	2.000.000.000	
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Persentase</b>	<b>85</b>	<b>615.758.959</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b>	<b>Persentase</b>	<b>85</b>	<b>453.000.000</b>	
	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</b>	<b>Persentase</b>	<b>98</b>	<b>97.873.038</b>	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK</b>	<b>Persentase</b>	<b>98</b>	<b>70.000.000</b>	
	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1100	97.873.038	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1100 Arsip	70.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Persentase	77	193.633.374	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Persentase	77	50.000.000	
	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Bogor	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	150	193.633.374	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Kab. Bogor	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	150 Arsip	50.000.000	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	Persentase	82	306.827.547	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Kab. Bogor	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK	Persentase	82	323.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1200	19.150.206	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1200 Arsip	23.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	6000	287.677.341	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	6000 Arsip	300.000.000	
	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kab. Bogor	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Persentase	85	17425000	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Kab. Bogor	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Persentase	85	10.000.000	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1	17.425.000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Kab. Bogor	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1 Arsip	10.000.000	



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>PROGRAM PERIZINANPENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Cakupan layan arsip yang bersifat tertutup</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>104.125.925</b>	<b>PROGRAM PERIZINANPENGGUNAAN ARSIP</b>	<b>Kab. Bogor</b>				<b>22.000.000</b>	
	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>104.125.925</b>	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK</b>	<b>Persentase</b>	<b>100</b>	<b>22.000.000</b>	
	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	1	54.125.925	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP	1 SOP	12.000.000	
	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1	50.000.000	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	<b>Kab. Bogor</b>	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	1 Arsip	10.000.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor, berikut adalah uraian mengenai proses bagaimana usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan yang diperoleh dari usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diadakan pada Forum Perangkat Daerah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang): Musrenbang merupakan forum partisipatif di mana pemangku kepentingan terkait dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor berkumpul. Pada forum ini, mereka berdiskusi mengenai aspirasi, masalah, dan potensi pembangunan di bidang arsip dan perpustakaan. Usulan-usulan program/kegiatan yang bersifat strategis, inovatif, dan relevan akan muncul dalam Musrenbang.

Adapun usulan yang ada dalam kegiatan Forum Perangkat Daerah adalah sebagai berikut dalam tabel 2.5 :

Tabel 2.5  
Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku  
Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Bogor

No	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Catatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Kab. Bogor	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	160	Lokus	Pengembangan Literasi Di Kabupaten Bogor yang melibatkan Duta Baca Agar nantinya bisa Berkolaborasi Dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

##### 3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

###### URUSAN KEARSIPAN

###### A. Telaahan Rencana Strategis ANRI

ANRI sebagai Lembaga Kearsipan Nasional mempunyai visi **“Menjadikan arsip sebagai simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Tahun 2025”**. dan misinya adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka NKRI.
5. Memberikan akses arsip kepada public untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan bagi kesejahteraan rakyat sesuai peraturan Perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

###### B. Telaahan Rencana Strategis PERPUSNAS RI

###### URUSAN PERPUSTAKAAN

Visi PERPUSNAS RI adalah: **“Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan”**. Dalam upaya pencapaian terhadap visi Perpustakaan Nasional, maka misi yang akan dicapai PERPUSNAS RI adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan professional.
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

## **A. Telaahan Rencana Strategis Dispusipda Provinsi Jawa Barat 2024 - 2026**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, secara fungsional harus terdapat hubungan secara konsisten dengan Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, atas dasar hal tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan Tufoksi Dispusipda Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

Tujuan :

1. Meningkatnya Ketersediaan Arsip yang autentik ;
2. Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip bersejarah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan arsip PD yang tertib;
- b. Meningkatnya ketersediaan sumber arsip kesejarahan.

Urusan Perpustakaan :

Tujuan :

1. Meningkatnya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya ketersediaan fasilitas membaca;
- b. Meningkatnya kebiasaan membaca masyarakat;
- c. Meningkatnya pemanfaatan bahan bacaan.



**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Memperkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya arsip sesuai dengan NSPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	93,00	Persen	3.720.000.000
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terjaganya kondisi fisik arsip yang bernilai guna	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	88,00	Persen	453.000.000
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tersedianya akses informasi arsip yang bersifat tertutup	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	100,00	Persen	22.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100,00	Persen	14.998.858.470
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,80	point	1.836.918.934



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terkelolanya koleksi naskah kuno dan koleksi muatan local daerah di kabupaten bogor	Persentase Data Digital Naskah Kuno dan Koleksi Muatan Lokal Daerah yang Dikelola dan Dilestarikan	53,58	Persen	20.000.000



**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Program dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
1	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya arsip sesuai dengan NSPK	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	93,00	Persen	3.720.000.000
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Terjaganya kondisi fisik arsip yang bernilai guna	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	88,00	Persen	453.000.000
		Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tersedianya akses informasi arsip yang bersifat tertutup	Cakupan layanan arsip bersifat tertutup	100,00	Persen	22.000.000
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	100,00	Persen	14.998.858.470



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
			TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6		7
2	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya minat membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61,80	point	1.836.918.934
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Terkelolanya koleksi naskah kuno dan koleksi muatan local daerah di kabupaten bogor	Persentase Data Digital Naskah Kuno dan Koleksi Muatan Lokal Daerah yang Dikelola dan Dilestarikan	53,58	Persen	20.000.000



**Tabel 3.3**  
**Dukungan terhadap Arah Kebijakan Nasional**

<b>KEBIJAKAN NASIONAL</b>	<b>TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG</b>	<b>PENGAMPU</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Urusan Perpustakaan</b>		
Peningkatan gemar membaca	a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan;	Bidang Perpustakaan
	b) Pelaksanaan layanan perpustakaan;	Seksi Layanan Perpustakaan, Pengolahan bahan pustaka dan otomasi perpustakaan
Pengembangan koleksi Indonesiana yang lengkap dan mutakhir	c) Pelaksanaan pengembangan koleksi perpustakaan;	
	d) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan bahan perpustakaan;	
Peningkatan diversifikasi dan kualitas layanan perpustakaan berbasis TIK	e) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan;	Seksi Permbinaan dan Pengembangan Perpustakaan
Pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa	f) Pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;	
Peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan sebagai pusat sumber belajar	g) Penyelenggaraan perpustakaan digital;	
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia	h) Pengembangan sistem informasi perpustakaan;	
	i) Pelaksanaan kerja sama perpustakaan;	
	j) Pelaksanaan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dan pelestarian fisik bahan perpustakaan;	



KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
	k) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan; dan	
	l) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
<b>Urusan Kearsipan</b>		
Peningkatan efektifitas pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis pada setiap lembaga negara dan badan pemerintahan serta lembaga swasta dan masyarakat;	a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan kearsipan;	Bidang Pembinaan Kearsipan
	b) Pengoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran bidang pembinaan kearsipan;	
	c) Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan kearsipan;	
	d) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kearsipan;	
	e) Pelaksanaan sosialisasi kearsipan;	
	f) Pelaksanaan audit dan penilaian hasil pengawasan kearsipan;	
	g) Pengelolaan data dan statistik di bidang kearsipan;	
	h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan	
Peningkatan ketersediaan arsip secara lengkap, otentik, dan reliable untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, dan akurat secara efektif dan efisien.	a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan arsip dinamis, arsip statis dan sistem informasi kearsipan, serta layanan dan pemanfaatan arsip;	Bidang Pengelolaan Kearsipan dan Sistem Informasi Kearsipan
Pembangunan kesadaran akan pentingnya arsip pada setiap lembaga negara dan badan pemerintahan serta lembaga swasta dan masyarakat dalam rangka terwujudnya efektifitas pengelolaan arsip dinamis;	b) Pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;	Seksi Pembinaan Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa



KEBIJAKAN NASIONAL	TUGAS DAN FUNGSI YANG MENDUKUNG	PENGAMPU
1	2	3
Peningkatan ketersediaan arsip secara lengkap, otentik, dan reliable untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, akurat secara efektif dan efisien;	c) Pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip;	Seksi Layanan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
Peningkatan ketersediaan arsip secara lengkap, otentik, dan reliable untuk memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, akurat secara efektif dan efisien;	d) Pelaksanaan usulan pemusnahan dan akuisisi arsip;	Seksi Pembinaan Lembaga Pendidikan, BUMD, dan Organisasi
Pembangunan kesadaran masyarakat untuk melindungi arsip bagi kepentingan perlindungan hukum terhadap hak-hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	e) Pengelolaan sistem informasi kearsipan;	Seksi Otomasi Kearsipan
Peningkatan kepedulian lembaga negara dan badan pemerintahan untuk menyelamatkan arsip dinamis bagi kepentingan perlindungan hak-hak keperdataan masyarakat.	f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan	
Peningkatan penyelamatan arsip dari lembaga- lembaga negara dan badan-badan pemerintah, swasta, dan perorangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;		
Peningkatan akses arsip yang seluas-luasnya pada publik dalam rangka mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik ;		
Pemberdayaan arsip bagi kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan.		
Pengembangan khasanah arsip dari instansi pemerintah, swasta dan perorangan dan jati diri daerah dan bangsa agar dapat dijadikan perekat kehidupan kebangsaan dalam bingkai NKRI		

### 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembagunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dan Dokumen Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 dalam upaya pencapaian target Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut:

#### A. Urusan Perpustakaan

Tujuan :

“Terwujudnya Pengembangan Literasi Masyarakat”.

Sasaran :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penerapan SPBE”.

#### B. Urusan Kearsipan

Tujuan :

“Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan layanan informasi arsip daerah sesuai dengan NSPK berbasis TI”.

Sasaran :

“Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada unit kearsipan untuk mendukung penerapan SPBE”.

### 3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 diuraikan menurut kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya, terdiri dari 6 Program, 19 Kegiatan dan 58 Sub Kegiatan adapun rencana keseluruhan pagu indikatif Belanja sebesar Rp. 21.050.777.404,00 uraian program dan kegiatan berdasarkan urusan yang direncanakan dalam Rencana Kerja 2025 adalah sebagai berikut :

#### **URUSAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM UTAMA**

1. Program Pembinaan Perpustakaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.



- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
  - 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
  - 4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - 5) Pengembangan Bahan Pustaka
  - 6) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
  - 7) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat
  - 2) Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - 3) Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
  - 4) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
  - 5) Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, terdiri dari 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
1. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
    - 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno

#### **URUSAN KEARSIPAN - PROGRAM UTAMA**

1. Program Pengelolaan Arsip, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota
    - 1) Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
    - 2) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
    - 3) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota
    - 1) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis



3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Kab/Kota
  - 1) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kab/Kota Melalui JIKN
  - 2) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota
2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun
    - 1) Penilaian dan Penetapan Pemusnahan Arsip yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun
  2. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang berskala Kab/kota
    - 1) Evakuasi dan indenfitikasi arsip Akibat Bencana
  3. Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kab/Kota;
    - 1) Penilaian dan Penetapan Auntentifikasi Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
    - 2) Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
  4. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
    - 1) Penilaian dan Penetapan Autensitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang
3. Program Perizinan Penggunaan Arsip, terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Pelayanan Izin PenggunaanArsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
  - 2 )Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
  - 3) Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup

#### **PROGRAM PENUNJANG**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan dengan perincian sebagai berikut:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;



- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
  - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Pengadaan Mebel



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



**Tabel 3.4**  
**Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025**

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
TUJUAN					
Terwujudnya Pengembangan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan            UPLM 2 = Ketercukupan koleksi            UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan            UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan            UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP            UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan            UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = <math>\frac{\sum UPLM}{ALMLM} \times 100</math></p>	67,00	Point
Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan layanan informasi arsip daerah sesuai dengan NSPK berbasis TI	Tingkat Persentase arsip yang dialihmediakan dan terautentikasi ke dalam sistem informasi kearsipan	Persentase arsip yang dialihmediakan dan terautentikasi ke dalam sistem informasi kearsipan	Jumlah arsip statis/vital yang dialihmedikan, terautentifikasi dan entry ke dalam sistem SIKN atau JIKN /Jumlah arsip statis/vital yang terkoleksi x 100	48,45	Persen



URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
SASARAN					
Meningkatnya kualitas pengelolaan perpustakaan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penerapan SPBE	Tingkat Persentase perpustakaan yang mengelola perpustakaan berbasis TI	Persentase perpustakaan yang mengelola perpustakaan berbasis TI	Jumlah perpustakaan yang mengelola layanan berbasis TI pada SDN dan SMP Negeri / Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan sekolah pada SDN dan SMP Negeri di wilayah x 100	22,09	Persen
Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan dengan memanfaatkan teknologi informasi pada unit kearsipan untuk mendukung penerapan SPBE	Tingkat Persentase unit kearsipan yang mengelola kearsipan berbasis teknologi informasi (TI)	Persentase unit kearsipan yang mengelola kearsipan berbasis teknologi informasi (TI)	Jumlah PD/Kec/BLUD yang mengelola arsip berbasis TI / Jumlah unit kearsipan x 100	65,79	Persen



**Tabel 3.5**  
**Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025**

<b>BIDANG / BAGIAN</b>	<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Bidang Perpustakaan	2	3	13	1.856.918.934
Bidang Kearsipan	3	8	13	4.194.999.998
Sekretariat/Penunjang	1	8	3	14.998.858.470

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

#### 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Berdasarkan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2024-2026

##### 4.1.1. Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumusan program dan kegiatan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor diarahkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor merupakan implementasi dari upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci dengan tolok ukurnya pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis yang berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026.

4.1.2. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, dalam Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor Tahun 2025 dirumuskan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor merumuskan 6 (enam) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub. kegiatan. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada table berikut:



TABEL 4.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025

URUSAN /UNSUR : WAJIB NON PELAYANAN DASAR  
 BIDANG URUSAN : PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
 PERANGKAT DAERAH : DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN</b>					21.196.378.343				20.591.064.171
	<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>					2.042.396.610	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.043.108.244
	<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					1.009.994.154	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.058.108.244,00
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	85 Perpustakaan	179.044.219	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85 Perpustakaan	248.632.982,00
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	12 Perpustakaan	170.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Perpustakaan	140.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	100 Orang	308.452.391	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Orang	220.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	52.500.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	1500 Eksemplar	167.497.544	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1500 Eksemplar	330.000.000,00
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1 Perpustakaan	85.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Perpustakaan	66.975.262,00
	<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.032.402.456</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>985.000.000,00</b>
		Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	3 Orang	129.900.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Orang	200.000.000,00
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	3 Perpustakaan	215.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Perpustakaan	220.000.000,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1 Perpustakaan	373.534.643	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Perpustakaan	45.000.000,00
		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	12 Orang	95.076.211	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Orang	200.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	120 Lokus	218.891.602	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	120 Lokus	320.000.000,00
	<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>					<b>20.000.000</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>25.000.000</b>
	<b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>20.000.000</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>25.000.000,00</b>
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno		50 Orang	20.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	25.000.000,00
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>15.212.609.086</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>13.975.050.660</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>272.827.000</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>275.747.149,00</b>
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	177.827.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	160.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	17.247.149,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	13.500.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.500.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	10.500.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	20.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	26.500.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	25.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	26.500.000,00
		Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	11.000.000,00
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>8.891.624.398</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>9.087.500.000,00</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	41 Orang/bulan	8.694.396.379	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41 Orang/bulan	8.900.000.000,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	104.997.799	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Dokumen	110.000.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		3 Dokumen	19.957.245	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	22.000.000



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	17.730.990	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	19.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		4 Laporan	54.541.985	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	36.500.000
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah layanan administrasi barang milik daerah yang terkelola</b>			<b>40.959.775</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>36.500.000</b>
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		5 Laporan	40.959.775	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Laporan	36.500.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>259.350.567</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>201.000.000</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	14.283.203	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	0
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		3 Dokumen	87.540.686	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Dokumen	111000000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10 Orang	157.526.678	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	90000000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>665.612.503</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1174303511</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	49.452.165	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	80000000



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	19 Paket	192.396.328	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19 Paket	234303511
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	41.680.694	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Paket	45000000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	128.819.700	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	180000000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	57.421.616	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Laporan	75000000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	43 Laporan	195.842.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43 Laporan	560000000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>1.629.808.283</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1000000000</b>
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	3 Unit	1.609.597.791	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	950000000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	135 Unit	20.210.492	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	135 Unit	50000000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>823.216.560</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>987000000</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	64.448.568	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	67000000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	250.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	310000000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	508.767.992	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	610000000



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>2.629.210.000</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1213000000</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	7 Unit	132.500.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	125000000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9 Unit	329.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9 Unit	280000000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	1 Unit	138.500.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	145000000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15000000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	1.998.000.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	500000000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	31.210.000	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	38000000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		110000000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>					<b>3.670.360.639</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>3.876.231.059</b>
	<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>1.168.503.297</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>1121231059</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	2200 Berkas	534.877.018	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2200 Berkas	616231059
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	1100 Berkas	177.271.380	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1100 Berkas	205000000
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	2 Laporan	155.423.309	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	205000000
		Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga	80 Lembaga	289.454.115	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80 Lembaga	80000000
		Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi	10 Instansi	11.477.475	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Instansi	15000000
	<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>49.256.767</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>280000000</b>
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	1100 Arsip	49.256.767	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1100 Arsip	280000000
	<b>Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>					<b>2.452.600.575</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>2475000000</b>
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	500 Pengguna	432.409.050	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500 Pengguna	465000000



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3 Laporan	2.020.191.525	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	2010000000
	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>					<b>251.012.008</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>646.174.208</b>
	<b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</b>					<b>24.484.043</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>100275000</b>
		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	1100 Arsip	24.484.043	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1100 Arsip	100275000
	<b>Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota</b>					<b>19.179.102</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>198474208</b>
		Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	150 Arsip	19.179.102	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	150 Arsip	198474208
	<b>Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota</b>					<b>202.978.663</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>330000000</b>
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1000 Arsip	3.170.357	Kab. Bogor	PENDAPATANASLI DAERAH(PAD)	1000 Arsip	25000000
		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2000 Arsip	199.808.306	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2000 Arsip	305000000



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2025				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang</b>					<b>4.370.200</b>	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>17425000</b>
		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip	1 Arsip	4.370.200	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Arsip	17425000
	<b>PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP</b>					-	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>25.500.000</b>
	<b>Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota</b>					-	<b>Kab. Bogor</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>25500000</b>
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP		-	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		13000000
		Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip		-	Kab. Bogor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12500000

BAB V  
P E N U T U P

Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan tahun 2025 telah berpedoman pada substansi RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2025, yang merupakan dokumen perencanaan tahun pertama pada periode perencanaan jangka panjang Tahun 2025-2045 dan periode perencanaan jangka menengah Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 disusun dan ditetapkan dengan peraturan bupati, untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA sampai dengan ditetapkan menjadi DPA Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2025.

Untuk selanjutnya, apabila dalam pelaksanaan Renja Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2025 terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah ditetapkan, akan dilakukan penyesuaian melalui Perubahan Renja, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

